

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

Adam chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua Jakarta, Sinar Grafika, 2012.

_____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi kedua , (jakarta : Sinar Grafika, 2008).

_____, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1998).

Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

Coky TN. Sinambela, Laurensius Rambe Manalu, Raingot Rambe Manalu, *Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan*. (Jakarta : cv Novindo Pustaka Mandiri, 2010).

Elwi Danil, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, (Jakarta: Pt Grafindo Persada, 2011).

Ermansyah Djaya, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Impilikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV?2006*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Hibnu Nugroho *Integralisasi Penyidiakn Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia* (Jakarta : Media Prima Aksara, 2012)

Juni Sjfrien Jahja, *Say No To Korupsi*, (Jakarta: Visi Media, 2012).



Krisna Harahap, *Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung*, (Bandung: PT Grafitri, 2006).

Leden Marpuang, *Proses Penanganan Tindak Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009).

Lintang Tesalonika Natalia Luntungan, *Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Crimen Vol. II/ No. 2/ Apr-Jun/2013.
Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, Masalah*, Edisi Revisi, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006).

Muladi, *Prinsip-prinsip Dasar Hukum Pidana Dalam Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Volume IV Nomor 1, 1998.

S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet. 3 (Jakarta : Stora Grafika, 2002).

Sabian Ustman, *Metode Penelitian Hukum Progresif: Pengembangan permasalahan Penelitian Hukum (Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014),

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).

Suewarno Handayani, *Pengantar Studi Administrasi, Dan Management*, (Jakarta : Gunung Agung, 2002).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alabeta, 2006).

T. Hani Handoko *Manajemen Edisi Kedua*, (Yogyakarta : BPFE, 2003).

Wirjono Pradjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, edisi 3 (Bandung : Refika Aditama, 2003).

Yopie Morya Immanuel Patiro, *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung : Keni Media, 2011).

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2015).

B. Internet. Dan Laporan

<https://www.kpk.go.id/id/berita/publik-bicara/102-opini/3869-menghentikan-regenerasi-koruptor>.

http://riset.ti.or.id/wpcontent/uploads/2015/09/IPK_2015_LAPORAN_AKHIR_-_fin_2.pdf.

<http://galaxyandromedha.blogspot.com/2008/11/deferensial-fungsional.html>.

<https://www.dream.co.id/dinar/survei-rentan-suap-bandung-jadi-kota-terkorup-150917x.html>.

https://mafiadoc.com/penegakan-hukum-jimly-asshiddiqie_5a1021d11723ddd903d75603.html.

<https://kbbi.web.id/pelaksanaan>.

<http://digilib.unila.ac.id/7211/12/BAB%20II.pdf>.

<http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kewenangan.html>.

Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 2016.

C. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Terhadap undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

